



ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT

Gian Riksa Wibawa¹
Arif²

Universitas Perjuangan Tasikmalaya^{1,2}

Email : gianriksawibawa@unper.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the regional financial performance (degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio) of districts/cities in West Java. And to see the effect, either simultaneously or partially on the Human Development Index. Using panel data, namely time series from 2016-2020 as well as cross section data of 18 districts and 9 cities in West Java. Using panel data regression analysis method. The findings of the analysis show that districts/cities in West Java still have relatively low regional financial performance. Panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM) method reveals that regional financial performance simultaneously has a significant effect on the Human Development Index, and partially degree of decentralization ratio has a positive and significant effect on the Human Development Index, regional financial dependency ratio and regional financial independence ratio have a negative and significant impact on the Human Development Index.

Keyword: *regional financial performance, degree of decentralization ratio, regional financial dependency ratio, regional financial independence ratio, human development index*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kinerja keuangan daerah (rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Serta guna melihat pengaruhnya baik secara simultan maupun parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Menggunakan data panel yaitu time series mulai tahun 2016-2020 serta data cross section 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat. Menggunakan metode analisis regresi data panel. Temuan analisis memperlihatkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih mempunyai kinerja keuangan daerah yang relatif rendah. Analisis regresi data panel memakai metode *Fixed Effect Model* (FEM) mengungkapkan kinerja keuangan daerah secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan secara parsial rasio derajat desentralisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kata kunci : *kinerja keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, indeks pembangunan manusia*



PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah dimulai sejak sebelum era reformasi, tepatnya ketika terbitnya UU No. 5 Tahun 1974 terkait pokok pemerintahan pada suatu daerah tingkat I, yakni Provinsi serta daerah tingkat II, yakni Kabupaten ataupun Kota (Halim, 2014: 2). Tidak lama setelah itu, pemerintah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1975 mengenai Pengurusan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah serta aturan lainnya yang memulai penyelenggaraan pemerintah daerah di era pra-reformasi.

Diberlakukannya sistem otonomi daerah ini membuat setiap pemerintah daerah berhak menghimpun serta mengelola sumber penerimaan yaitu PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah, dll. Dengan demikian Pemda dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber penerimaan dan dapat menggunakannya dengan efektif serta efisien guna melayani dengan maksimal ke masyarakat. Tidak hanya itu, Pemda pun dituntut bisa mengelola pemerintahannya dengan transparan dan akuntabel.

Transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemda merupakan tuntunan publik yang sudah seharusnya direspon secara baik dan positif. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus transparan dalam memberi informasi berkaitan kegiatan mengenai pengelolaan sumber daya ke para pihak yang memerlukan data (Mahmudi, 2016: 3). Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan keuangan negara bisa diketahui oleh masyarakat, diadakan dengan baik dan tertib, taat ke aturan perundangan, efisien dan ekonomis, serta sesuai dengan apa yang telah diamanatkan.

Ada banyak indikator yang bisa dipakai menghitung level kesejahteraan masyarakat, diantaranya secara sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain melalui instrumen seperti indeks pembangunan manusia (*human development index*), pendapatan perkapita (*income per capita*), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tingkat kemiskinan serta rasio gini. Indikator tersebut memiliki cara pengukuran yang berbeda dilihat dari faktor mana yang akan jadi ukuran. Indikator itu memiliki esensi pengukuran yang berbeda-beda sehingga tidak bisa dibandingkan antara indikator satu dengan yang lainnya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah harus seimbang dengan kesejahteraan masyarakat yakni tujuan utama pelaksanaan rencana kerja Pemda, sehingga pemakaian APBD akan memberi dampak terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat. Karenanya, keberhasilan Pemda dalam meningkatkan kinerja pemerintah akan berkelanjutan. Makin baik kinerja Pemda, tentunya akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan rencana Pemda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong pembangunan daerah.

Fenomena saat ini yakni pemanfaatan pendapatan daerah oleh keuangan daerah belum optimal, dan keuangan daerah masih mengandalkan pembayaran transfer pusat. Semua pengeluaran di daerah harus dibayar dengan PAD, sehingga daerah tersebut bisa dikatakan otonom dan tak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Desentralisasi terkait dua hal, yaitu kemandirian daerah menentukan pengeluaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan, serta kemandirian daerah dari pengeluaran tersebut guna mendapat pemasukan.

Dari penjabaran tersebut, penulis ingin menyusun penelitian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah) terhadap Indeks Pembangunan Manusia”.



Tujuan penelitian ini yakni guna mencari tahu serta menganalisa:

1. Rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah serta IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah secara Simultan dan Parsial terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja yakni suatu pencapaian yang telah direncanakan pribadi ataupun suatu organisasi (Sularso dan Restianto, 2011).

Kinerja keuangan merupakan gambaran level pelaksanaan program guna mewujudkan tujuan, sasaran, misi serta visi sebuah organisasi yang terdapat di rencana strategi organisasi (Mohamad Mahsun, 2012: 25).

Kinerja keuangan daerah yakni pencapaian hasil keuangan daerah, termasuk pendapatan daerah serta belanja daerah. Indikator keuangan yang digunakan ditentukan oleh kebijakan perundangan dalam suatu periode anggaran. (Oesi Agustina, 2013: 3).

Ada banyak indikator untuk mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah daerah, antara lain tingkat kemandirian keuangan daerah, efisiensi pendapatan fiskal daerah, DSCR, serta tingkat pertumbuhan (Abdul Halim, 2014). Analisis rasio yang dipakai yakni derajat desentralisasi, ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah, efisiensi PAD, serta rasio efisiensi pajak daerah, (Mahmudi, 2016: 140). Rasio keuangan yang dipakai guna menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah mengacu pada rasio yang bisa diperoleh dari data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, antara lain: (Mahmudi, 2016: 140):

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Memperbandingkan PAD dengan total penerimaan suatu daerah. Sehingga memperlihatkan sejauh mana kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Makin banyak kontribusi PAD makin besar pula kemampuan Pemda menyelenggarakan desentralisasi.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Memperbandingkan total penerimaan transfer pusat dan provinsi dengan total penerimaan daerah. Makin besar rasionya makin besar pula ketergantungan Pemda pada pemerintah pusat dan provinsi.

3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Membagi PAD dengan total penerimaan transfer dan pinjaman pusat serta provinsi. Makin besar rasionya makin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kinerja keuangan Pemda yang baik harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator penilaian kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melihat IPM. Ini karena IPM menilai kesejahteraan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pendapatan masyarakatnya, dimana program-program pemerintah daerah yang ada dapat meningkatkan indikator tersebut. Sebuah daerah dikatakan berkembang, maju ataupun terbelakang dapat dilihat dari IPM-nya.



Indeks Pembangunan Manusia

Permenkominfo No. 39 Tahun 2008 pasal 3 ayat 3 mengenai Daerah Ekonomi Maju serta Kurang Maju pada pelaksanaan penyiaran menjabarkan: “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hasil perhitungan Badan Pusat Statistik yang dikaitkan dengan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi”.

UNDP lewat Human Development Report Tahun 1996 dalam IPM yang dirilis Badan Pusat Statistik (2015) mengadakan publikasi mengenai Konsep IPM, pembangunan manusia definisinya yakni: “A process of learning people’s choice”.

Dalam publikasi BPS (2015) mengenai IPM menjelaskan bahwa: “Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Human Development Report 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, dituturkan empat indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu angka harapan hidup saat lahir (AHH), angka melek huruf (AHM), gabungan angka partisipasi kasar (APK) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita”.

Todaro (2003: 28) dalam bukunya Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga menjelaskan bahwa: “*human development index* menjadi indikator kesejahteraan manusia yang dapat menunjukkan kemajuan manusia berdasarkan faktor-faktor seperti rata-rata harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu *human development index* merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah”.

Indikator indeks pembangunan manusia tumbuh diatas pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi sangat penting guna menjaga kesejahteraan rakyat, tetapi pertumbuhan hanyalah alat, yang paling penting yakni bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat serta bagaimana masyarakat memakai kemampuannya. Keuntungan dari Indeks Pembangunan Manusia adalah dapat mengungkapkan suatu wilayah bisa berbuat lebih baik di level pendapatan rendah, serta peningkatan pendapatan yang substansial memiliki efek yang relatif kecil pada pembangunan manusia. (Todaro, 2003: 28).

METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang dipakai yakni deskriptif kuantitatif, yakni data keuangan Pemda yang didapat melalui perhitungan, guna mengetahui apakah berdampak pada indeks pembangunan manusia, guna menyelesaikan masalah sesuai tujuan penelitian.



Operasionalisasi variabel penelitian ini bisa diketahui di Tabel 1 di bawah:

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel (1)	Konsep (2)	Indikator (3)	Skala (4)
Rasio Derajat Desentralisasi (X1)	Rasio derajat desentralisasi dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X2)	Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer pusat dan provinsi yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah.	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X3)	Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer pusat, provinsi serta pinjaman daerah..	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
Indeks Pembangunan Manusia (Y)	<i>A process of learning people's choice</i> (UNDP dalam Publikasi BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia 2016)	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$	Rasio

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Data yang diperoleh dari rasio derajat desentralisasi dapat menunjukkan kabupaten serta kota di Jawa Barat secara umum meningkat dari tahun 2016-2020. Ini memperlihatkan kabupaten serta kota di Jawa Barat makin banyak memberikan kontribusi terhadap PAD, namun apabila dilihat dari rasio derajat desentralisasi, kabupaten serta kota di Jawa Barat dalam status sangat kurang sampai dengan baik, yang tentunya evaluasi setiap pemerintah daerah diperlukan untuk



lebih meningkatkan PAD-nya agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pelaksanaan desentralisasi.

Dari data rasio ketergantungan keuangan daerah yang diperoleh, terlihat kabupaten serta kota di Jawa Barat menurun dari tahun 2016-2020. Ini memperlihatkan kabupaten serta kota di Jawa Barat belum bisa lepas dari pemerintah pusat serta provinsi, yang tentunya merupakan hal yang baik bagi pemerintah daerah itu sendiri. Namun jika dilihat dari nilai masing-masing kabupaten dan kota, hampir setiap kabupaten serta kota masih berada pada level cukup hingga sangat tinggi. Hal ini tentu mengkhawatirkan, karena masih banyak kabupaten serta kota di Jawa Barat yang tergantung ke pemerintah pusat atau provinsi.

Ini bisa diketahui dari data tingkat kemandirian keuangan daerah yang diperoleh bahwa ada perbedaan tingkat diantara berbagai kabupaten serta kota di Jawa Barat dari 2016-2020. Dilihat dari kisaran angka di atas, kabupaten serta kota di Jawa Barat secara umum ada di tingkat sedang hingga tinggi, atau disebut pola hubungan partisipatif dan delegatif.

Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Setelah mengolah data, diperoleh gambaran mengenai bagaimana IPM tahun 2016-2020 pada kabupaten serta kota di Jawa Barat. Level IPM yang paling tinggi setiap tahunnya adalah Kota Bandung. Sedangkan tingkat IPM yang paling rendah setiap tahunnya yakni Kab Cianjur. Umumnya, IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat ada di tingkat Sedang s/d Sangat Tinggi, hal ini tentu tidak terlalu memprihatinkan dimana tidak terdapat Kabupaten serta Kota yang berada pada tingkat Rendah, namun apabila dilihat dari segi Kabupaten dan Kota yang dikategorikan Sangat Tinggi pun hanya Kota Bandung yang masuk kategori ini. Ini tentunya bisa dijadikan motivasi bagi daerah lainnya agar tingkat IPM di daerahnya semakin tahun semakin meningkat.

Hasil Regresi Data Panel Uji Chow

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	108.083669	(26,103)	0.0000
Cross-section Chi-square	444.521907	26	0.0000

Setelah melihat hasil Uji Chow pada Tabel 2, yakni pada Cross-section Chi-square Prob. yaitu 0,0000. Hal tersebut menunjukkan Cross-section Chi-square Prob. < 0,05 atau nilai Prob yang lebih spesifik adalah $0,0000 < 0,05$ maka kesimpulannya Uji Chow memilih Fixed Effect dibanding Common Effect.



Uji Hausman

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.188461	3	0.0017

Setelah melihat hasil Uji Hausman pada Tabel 3 yakni pada Cross-section Chi-square yang disini disebut nilai P Value. Nilai P Value yakni 0,0017. Hal itu menunjukkan Nilai P Value $0,0017 < 0,05$, maka kesimpulannya adalah Uji Hausman memilih Fixed Effect dibanding Random Effect.

Jadi setelah melakukan Uji Chow serta Uji Hausman maka kesimpulan dari hasil pengujian tersebut adalah penelitian ini memakai Metode FEM (*Fixed Effect Model*).

Pengujian Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji ini dilakukan guna melakukan pengujian pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara bersamaan. Pengujian diadakan dengan melihat hasil regresi yang telah selesai, yakni dengan membandingkan level signifikansi. Jika $p\text{-value} \leq \alpha$, maka H_A diterima. Dan jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_A ditolak.

Dari hasil regresi menggunakan metode FEM dapat diketahui Probabilitas F statistik ($p\text{-value}$) yakni $0,000000 < 0,05$ sehingga H_A diterima artinya variabel kinerja keuangan daerah yakni rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan dan kemandirian keuangan daerah secara simultan berpengaruh pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari tahun 2016-2020.

Uji t (Parsial)

Uji ini dilakukan guna mencari tahu peran variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Ini bisa diadakan untuk mengetahui hasil regresi yakni membandingkan level signifikansi setiap variabel bebas dengan α . Jika $\leq \alpha$, maka H_0 ditolak serta H_A diterima. Sebaliknya jika $> \alpha$, maka H_0 diterima serta H_A ditolak. Dapat diketahui dari hasil regresi metode FEM :

1. Variabel X1 Probabilitas $0,0001 < 0,05$ maka H_0 ditolak serta H_A diterima. Berarti variabel Rasio Derajat Desentralisasi memberi pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat.
2. Variabel X2 Probabilitas $0,0049 < 0,05$ maka H_0 ditolak serta H_A diterima. Berarti variabel Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memberi pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat.
3. Variabel X3 Probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak serta H_A diterima. Berarti variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memberi pengaruh signifikan pada IPM di Kabupaten serta Kota di Jawa Barat.



Pembahasan

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data FEM, nilai koefisien determinasi (R^2) sejumlah 0,9721. Terlihat bahwa 97,21% indeks pembangunan manusia provinsi dan kota Jawa Barat dipengaruhi oleh “derajat desentralisasi, derajat ketergantungan keuangan daerah serta derajat kemandirian keuangan daerah”. 2,79% mendapat pengaruh variabel lain di luar model.

Nilai statistik F rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah adalah 160,1063. Nilai dengan tanda positif (+) menunjukkan korelasi positif. Rasio desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah serta level kemandirian keuangan daerah signifikan secara statistik pada $\alpha = 0,05$, serta nilai probabilitas yakni 0,000000 lebih kecil dari level signifikansi. Ini memperlihatkan hipotesis rasio desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah serta kemandirian keuangan daerah secara simultan memberi pengaruh pada IPM bisa diterima. Dengan begitu bisa diambil kesimpulan rasio desentralisasi, tingkat ketergantungan fiskal daerah, dan tingkat kemandirian keuangan daerah secara simultan memberi pengaruh positif serta signifikan pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari tahun 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian sebelumnya oleh Freska Ghousario dan Christiana Fara Dharmastuti berjudul “Kinerja Keuangan Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia” pada tahun 2014, yang didasarkan pada penelitian terhadap 20 kabupaten/kota di tingkat pertama.

Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Nilai koefisien variabel Decentralization Degree Ratio adalah 4356.515. Nilai koefisien variabel dengan tanda positif (+) menunjukkan korelasi yang positif. Rasio desentralisasi signifikan secara statistik pada $\alpha = 0,05$, serta nilai probabilitasnya yakni 0,0001, lebih kecil dari level signifikansi. Hal ini memperlihatkan hipotesis bahwa derajat desentralisasi memberi pengaruh signifikan pada IPM bisa diterima. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan derajat desentralisasi memberi pengaruh positif serta signifikan pada IPM daerah dan kota di Jawa Barat dari tahun 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian yang berjudul “Hubungan antara Indikator Pembangunan Keuangan India dan Pembangunan Manusia” oleh Madhu Sehra dan A.K Giri pada tahun 2014.

Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Nilai koefisien variabel ketergantungan keuangan daerah adalah -1182.946. Nilai koefisien variabel dengan tanda minus (-) menunjukkan korelasi yang negatif. Rasio ketergantungan keuangan daerah signifikan secara statistik pada $\alpha = 0,05$, serta nilai probabilitasnya 0,0049 lebih kecil dari level signifikansi. Hal ini memperlihatkan asumsi bahwa tingkat ketergantungan fiskal daerah memberikan pengaruh signifikan pada IPM dapat diterima. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan level ketergantungan keuangan daerah memberi pengaruh negatif signifikan pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian tahun 2017 oleh Baldrick Siregar dan Nurna Pratiwi yang berjudul “Karakteristik Pemerintah Daerah Indonesia dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia”.



Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Nilai koefisien variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar -516,1658. Nilai koefisien variabel dengan tanda positif (-) menunjukkan korelasi yang negatif. Rasio kemandirian keuangan daerah secara statistik signifikan di $\alpha = 0,05$, serta nilai probabilitasnya yakni 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi. Ini memperlihatkan asumsi bahwa level kemandirian keuangan daerah memberi pengaruh signifikan pada IPM dapat diterima. Dengan begitu bisa diambil kesimpulan tingkat kemandirian keuangan daerah memberi pengaruh negatif signifikan pada IPM kabupaten serta kota di Jawa Barat dari 2016 hingga 2020. Ini sesuai penelitian Irham Iskandar pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Dana Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Otonomi Khusus”.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil analisa kinerja keuangan Pemkab serta Pemkot di Provinsi Jawa Barat yakni:
 - a. Dari rasio desentralisasi, bisa diambil kesimpulan desentralisasi kabupaten serta kota di Jawa Barat dari tahun 2016-2020 masih rendah. Ini disebabkan kontribusi PAD relatif kecil, yang membuat desentralisasi kabupaten serta kota di Jawa Barat tidak optimal.
 - b. Dari sisi ketergantungan keuangan daerah di kabupaten serta kota Jawa Barat relatif tinggi dari tahun 2016-2020. Ini memperlihatkan kabupaten serta kota di Jawa Barat masih mengandalkan transfer pemerintah pusat serta provinsi guna mendanai belanja daerah.
 - c. Dari perspektif kemandirian keuangan daerah, bisa diambil kesimpulan kemandirian keuangan daerah kabupaten serta kota Jawa Barat dari tahun 2016-2020 belum merata antar daerah, ada yang tinggi, tetapi banyak juga yang sangat rendah. Ini memperlihatkan kabupaten serta kota di Jawa Barat mengandalkan bantuan eksternal untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Hasil analisis metode FEM memperlihatkan kinerja keuangan yakni rasio derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, serta kemandirian keuangan daerah secara simultan memberi pengaruh signifikan pada IPM di kabupaten serta kota di Jawa Barat tahun 2016-2020.
3. Hasil analisis memakai metode FEM secara parsial memperlihatkan:
 - a. Rasio Derajat Desentralisasi memberikan pengaruh positif signifikan pada IPM.
 - b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memberikan pengaruh negatif signifikan pada IPM.
 - c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memberikan pengaruh negatif signifikan pada IPM.

Saran

1. Meningkatkan PAD utamanya dari pajak serta retribusi, sehingga pemerintah kabupaten serta pemerintah kota di Jawa Barat mendapatkan realisasi anggaran pendapatan yang lebih besar.
2. Meningkatkan desentralisasi, meminimalisir ketergantungan keuangan daerah serta meningkatkan kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat dengan usaha intensifikasi serta ekstensifikasi PAD yang belum optimal secara menyeluruh serta memihak kepada masyarakat.



DAFTAR RUJUKAN

- Agustina Oesi, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kota Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Akbar, Bahrullah dan Djazuli, Achmad. 2015. *Audit Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Studi Pada Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2013*. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, Volume 1, Nomor 1, Juli 2015: 1–19.
- Arnan, Sendi Gusnandar. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Transfer Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Asmita, Fitriawaty dan Dede Ruslan. 2017. *Analysis of Factors Affecting the Human Development Index in North Sumatera Province*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Astuti, Wuku. 2015. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Universitas Widya Mataram.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. BPS RI. www.bps.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2020. *Jawa Barat Dalam Angka 2020*. BPS Jabar. www.jabar.bps.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Boedi, Soelistijino. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan.
- Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali*. E- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Data Keuangan Daerah 2016-2020*. DJPK RI. www.djpk.kemenkeu.go.id. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Gousario, Freska dan Christiana Fara Dharmastuti. 2017. *Regional Financial Performance and Human Development Index based on study in 20 Counties/Cities of Level I Region*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.



- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 1-5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendro, Galih M., dkk. 2010. *Penggunaan Metodologi Analisa Komponen Utama (PCA) untuk Mereduksi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyakit Jantung Koroner*. Seminar Nasional “Science, Engineering and Technology”.
- Iskandar, Irham. 2017. *Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy*. Jawa Tengah: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nirwana, Ema, Taufeni Taufik dan Vince Ratnawati. 2014. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*. Riau: Universitas Riau.
- Nujum, Syamsu, Annas Plyriadi dan Muhammad Nur. 2015. *Analysis of the Reciprocal Relationship of Local Government Expenditure Towards Human Development Index (HDI) and its Influence on Economic Performance in South Sulawesi*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Nurlina dan Iskandar Muda. 2017. *The Analysis of the Effects of Capital Expenditure and Human Development Index on Economic Growth and Poverty in East Aceh Regency*. Aceh: Universitas Samudra. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Pabundu. 2010. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Panggabean, Meiran. 2014. *The Influence of Private Investment, Human Development Index (HDI) and Local Government Capital Expenditure (LGCE) on the Economic Growth and Original Local Government Revenue (OLGR) in the Regency/City of West Kalimantan Province*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Pascucci, Francesco. 2011. *Financial Development and Human Development Index*. Milan: Università Commerciale Luigi Bocconi.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.



- Rizak, Basri. 2015. *The Effect of Regional Revenue and Expenditures Toward Human Development Index of Central Sulawesi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rondonuwu, Giftovel. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.
- Sandri, Ni Ketut, I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putrid dan A.A.N.B Dwirandra. 2015. *Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia*. Bali: Universitas Udayana.
- Santoso, Singgih. 2015. *Menguasai Statistik Multivariat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sari, Ayu Kurnia, Hendra Saputra dan Andysah Putera Utama Siahaan. 2017. *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Sehrawat, Mahdu dan A.K Giri. 2014. *The Relationship Between Financial Development Indicators and Human Development in India*. Pilani: Birla Institute of Technology and Science.
- Siregar, Baldric dan Nurna Pratiwi. 2017. *The Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia*. Sleman: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Sularto dan Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah*. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1)*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.



Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

United Nations Development Programme (UNDP). 2016. *Human Development Report 2016*. UNDP. www.undp.org. Diakses pada 20 Desember 2021.

Zahari M dan Sudirman. 2017. *The Effect of Government Expenditures in Education and Health against Human Development Index in Jambi Province*. Jambi: Universitas Batanghari.